



# Pengaruh Variabel Sosio-Ekonomi, Infrastruktur, Teknologi dan Kelembagaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fanni Larassati\*, Deky Aji Suseno

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Jl. Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>fanni009@students.unnes.ac.id, <sup>2</sup>dekyajisuseno@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: fanni009@students.unnes.ac.id

Submitted: 10/01/2026; Accepted: 23/04/2026; Published: 07/05/2026

**Abstrak**—Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) didirikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam jangka panjang tidak hanya berdampak pada ekonomi melainkan juga kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan masyarakat di provinsi yang tidak terdapat KEK justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang memiliki KEK. Dalam pendirian KEK, terjadi eksklusivitas pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada KEK semata sehingga tidak mampu meningkatkan PDRB per Kapita masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan kelembagaan terhadap PDRB per Kapita. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada 15 provinsi yang terdapat KEK di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2023. Data penelitian ini ialah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pertumbuhan Endogen, Ekonomi Kelembagaan Baru dan Modernisasi. Data diuji menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) berpengaruh positif terhadap Indeks Demokrasi (IDI). Sebaliknya, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Panjang Jalan (PJ) berpengaruh negatif terhadap IDI, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Penduduk Bekerja (PB) tidak berpengaruh terhadap IDI. Di sisi lain, RLS dan PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB per Kapita. Akan tetapi, PB dan PMA berpengaruh negatif terhadap PDRB per Kapita, sedangkan IDI menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita.

**Kata Kunci:** PDRB per Kapita; Rata-rata Lama Sekolah; Penduduk Bekerja; PMA; PMDN; Panjang Jalan; Indeks TIK; Indeks Demokrasi

**Abstract**—Special Economic Zones (SEZs) were established to accelerate regional economic growth, which in the long term will not only impact the economy but also the welfare of the community. However, the welfare of people in provinces without SEZs is actually higher when compared to provinces with SEZs. In the establishment of SEZs, there is an exclusivity of growth that is only concentrated in SEZs alone, thus unable to increase the local society's GRDP per capita. This study aims to analyze the influence of social, economic, infrastructure, technological, and institutional variables on GRDP per capita. This research method uses a quantitative approach in 15 provinces with SEZs in Indonesia during the period 2016-2023. This research data is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia (BI), and the Investment Coordinating Board (BKPM). The theories employed are Endogenous Growth Theory, New Institutional Economics, and Modernization Theory. The data were analyzed using the SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Squares) method with WarpPLS 8.0. The result of the study indicate that Domestic Investment and ICT Development Index have a positive effect on the Democracy Index. Conversely, Foreign Investment (FDI) and Road Length have a negative effect on the Democracy Index, while Average Years of Schooling and Workforces have no effect on the Democracy Index. On the other hand, Average Years of Schooling and Domestic Investment have a positive effect on GRDP per Capita. However, Workforces and FDI have a negative effect on GRDP per Capita, while the Democracy Index shows no effect on GRDP per Capita.

**Keywords:** GRDP per Capita; Average Years of Schooling; Workforces; FDI; Domestic Investment; Road Length; ICT Development Index; Democracy Index

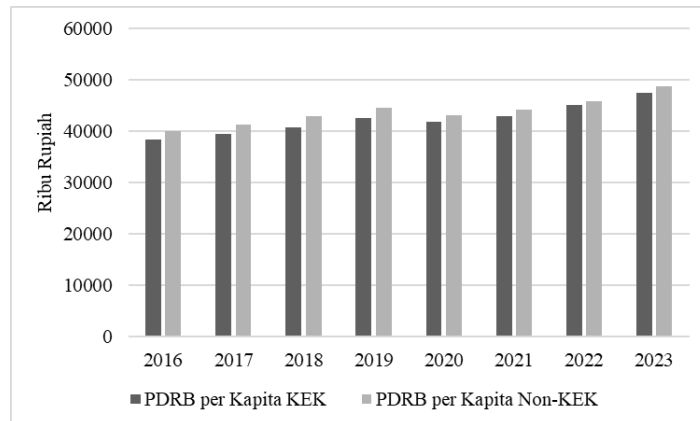
## 1. PENDAHULUAN

Salah satu strategi pemerintah dalam pemeratakan pembangunan ialah dengan menjadikan ekonomi daerah sebagai pilar utama kemajuan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). RPJPN 2025-2045 disusun guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (KADIN Indonesia, 2023). Terdapat empat pilar utama dalam Visi Indonesia Emas, yaitu: (1) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), (2) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (3) pemerataan hasil pembangunan, (4) penguatan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan yang baik (Bappenas, 2023). Berdasarkan pilar-pilar tersebut, pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK telah menjadi pilar utama dalam strategi Indonesia menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh daerah (GGGI, 2022). Keberadaan KEK dalam suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas, tidak terbatas pada perusahaan manufaktur asing tetapi juga kepada pekerja domestik atau rumah tangga sehingga lebih banyak kontrak kerja yang lebih formal (Contractor et al., 2020).

Mengacu pada UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK, KEK ialah kawasan yang didirikan dalam wilayah hukum Indonesia yang merupakan amanat UU No. 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kini Indonesia memiliki 24



KEK yang tersebar di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan dari pembangunan KEK adalah mendorong percepatan realisasi investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan (Gallé et al., 2024; Tafese et al., 2025). Pembangunan infrastruktur, investasi sumber daya manusia, perbaikan kelembagaan, dan sebagainya dalam KEK oleh pemerintah dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Dirmayanti & Damayanti, 2023).



**Gambar 1.** PDRB per Kapita Provinsi KEK dan PDRB per Kapita Provinsi Non-KEK Tahun 2016-2023

Berdasarkan Gambar 1 pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi terjadi pada provinsi-provinsi yang tidak terdapat KEK daripada provinsi-provinsi yang memiliki KEK pada tahun 2016-2023. Temuan kondisi ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardhana et al., (2025) yang menyatakan bahwa keberadaan KEK Kendal memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah Kendal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Otchia & Wiryawan, (2025) turut menyatakan bahwa keberadaan KEK memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Asia dan Amerika Latin. Serta, penelitian yang dilakukan oleh Bergantino et al., (2026) yang menyatakan bahwa keberadaan KEK memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Italia Tenggara.

Keberhasilan KEK tersebut yang bertentangan dengan kondisi di provinsi-provinsi yang terdapat KEK di Indonesia ini mengindikasikan bahwa keberadaan KEK saja belum cukup untuk menjamin peningkatan ekonomi daerah, tanpa dukungan dari faktor-faktor struktural yang mendasar. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar negara berkembang dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah menuju visi Indonesia Emas 2045. RLS ialah indikator pendidikan yang menggambarkan lamanya individu menempuh suatu jenjang pendidikan yang dapat mengukur tingkat pendidikan suatu daerah (Valiant Kevin et al., 2022). RLS ini juga termasuk dalam indikator faktor sosial yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia. Berbagai penelitian terdahulu Correa & Esquivias, (2025); Röthel & Leschke, (2025) telah menggunakan RLS sebagai proksi untuk pendidikan.

Namun, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya berasal dari ketersediaan kualitas SDM saja melainkan juga dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan profesional (Atake et al., 2024). Guna melihat kualitas modal manusia dapat diketahui melalui RLS, sedangkan kuantitas modal manusia dapat diketahui melalui penduduk bekerja (Anshori, Winarti, & Wijayanti, 2025). Penduduk bekerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang merujuk pada seseorang yang sedang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan baik di sektor formal maupun informal (Wulandari, 2023). Ketersediaan penduduk bekerja menjadi salah satu faktor krusial dalam roda perekonomian. Selasar dengan beberapa penelitian terdahulu oleh Julianto & Mukhtar, (2022); Oliveira et al., (2025) telah menggunakan penduduk bekerja sebagai akumulasi modal manusia guna menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Variabel ekonomi ialah salah satu faktor fundamental yang kerap mendapatkan perhatian khusus dibandingkan faktor lain karena dampaknya yang langsung berpengaruh terhadap hajat orang banyak. PMA ialah salah satu faktor ekonomi yang esensial dalam pembangunan ekonomi. Menurut Todaro & Smith (2020) PMA dalam negara berkembang dapat membantu penyaluran modal sehingga dapat meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk. PMA turut andil dalam membantu percepatan pembangunan ekonomi khususnya pada ekonomi negara berkembang (OECD, 2025). PMA dapat merangsang aktivitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan serta transfer teknologi dari negara maju (Al-kasasbeh et al., 2022; Contractor et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahadiansar et al. (2021) menyatakan bahwa PMA di Indonesia dapat membuka peluang pasar Indonesia menjadi pasar global.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah, apabila dilihat dalam sudut pandang Teori Pertumbuhan Endogen maka pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan tercapainya investasi PMA melainkan juga dari PMDN. PMA dan PMDN keduanya berfungsi sebagai mesin penting bagi transformasi ekonomi lokal karena dapat mendorong integrasi rantai nilai, mendorong inovasi, dan mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah di Indonesia (Dirmayanti & Damayanti, 2023). PMDN dapat memberikan gambaran terkait



lingkungan investasi domestik yang dapat menarik penanaman modal yang lebih jauh dapat berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan (Nguyen, 2022). Peningkatan stok modal dalam negeri berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat, kapasitas produksi, dan kualitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan karena dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Purba, 2020).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dengan menyediakan modal finansial dan modal manusia, melainkan juga modal fisik berupa infrastruktur khususnya jalan (Chen et al., 2023). Infrastruktur jalan yang baik dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pasokan bahan baku, pasar tenaga kerja, dan konsumen. Ketersediaan jalan dapat memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko operasional serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan produktivitas pelaku ekonomi (Mulyani et al., 2023). Infrastruktur panjang jalan menyediakan konektivitas di berbagai wilayah yang dapat mempermudah aksesibilitas pasar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pradhan et al., 2021). Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan infrastruktur panjang jalan seperti, Lestari et al., (2025); Wang et al., (2020) yang menyatakan bahwa infrastruktur panjang jalan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.

Berdasarkan Visi Indonesia Emas 2045, kemajuan teknologi merupakan pilar pertumbuhan keberlanjutan dalam mempercepat transformasi digital kaitannya dengan pemerataan pembangunan ekonomi daerah (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi instrumen penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, institusi, dan hubungan sosial (Roztocki et al., 2020). Pembangunan TIK yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyebarluaskan informasi sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja, kekayaan produk dan layanan serta menciptakan pasar kompetitif global untuk produk dalam negeri (Tripathi & Inani, 2020). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melainkan juga mendukung pemerataan pembangunan. Beberapa penelitian terdahulu seperti, Pratiwi & Hanri, (2024); Suhendra et al., (2025) yang mengungkapkan bahwasannya TIK memiliki pengaruh positif serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demokrasi ialah sistem yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan dijalankan guna memastikan akuntabilitas dan mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan (Trinugroho et al., 2023). Oleh karenanya, pembangunan demokrasi menjadi salah satu hal penting yang terus diupayakan pemerintah yang dampaknya terhadap landasan pengambilan keputusan akan kebijakan dan perumusan strategi. Kelembagaan dengan kualitas yang baik dapat memediasi faktor-faktor fundamental seperti sosial, ekonomi dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Kelembagaan berperan menciptakan stabilitas sosial-politik, mengkoordinasi dan mengatur supremasi hukum maupun aktivitas antar pelaku ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Uddin et al., 2023). Selain itu, kelembagaan berperan juga menciptakan kebijakan pemerintah yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi (Bonita & Widyawati, 2020). Beberapa hasil penelitian terdahulu Hardi et al., (2023); Nairobi et al., (2021) menyatakan bahwasannya IDI berdasarkan provinsi berpengaruh positif signifikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian ini mengacu pada Teori Pertumbuhan Endogen yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dikaitkan dengan peningkatan produksi yang dihasilkan oleh spesialisasi pekerjaan, perkembangan teknologi endogen yang didorong dari akumulasi pengetahuan oleh agen-agen berwawasan ke depan yang dapat menghasilkan keuntungan, serta investasi pada pengetahuan yang dapat menciptakan eksternalitas positif (Romer, 1990). Di sisi lain, teori ini turut menggunakan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru yang dikemukakan oleh Douglas North dan Acemoglu & Robinson (Payen & Rondé, 2025; Yaqoob et al., 2025). Lembaga yang berkualitas akan menurunkan biaya transaksi dan ketidakpastian, memperkuat efektivitas kebijakan publik, dan mendorong investasi dan inovasi (Desmarais-Tremblay & Stojanović, 2022). Peran lembaga dalam menyusun aturan seperti pembentukan undang-undang dan sebagainya merupakan sebuah mekanisme yang dibuat untuk membentuk kelembagaan sebagai aturan main (Yustika, 2012). Sementara itu, Teori kelembagaan baru yang diperkenalkan oleh Acemoglu dan Robinson lebih menekankan pada adanya dua kategori struktur kekuasaan lembaga, yakni lembaga inklusif dan ekstraktif. Pada lembaga inklusif, lembaga menjamin adanya perlindungan hukum, akuntabilitas publik serta regulasi yang jelas guna mendorong investasi, sedangkan lembaga ekstraktif dicirikan dengan adanya konsentrasi kekuasaan dalam lembaga yang membatasi penegakan regulasi hukum yang jelas dan transparan yang lebih lanjut menghambat pembangunan ekonomi (Garoupa & Spruk, 2024). Menurut Teori Modernisasi yang dikemukakan oleh Lipset, negara yang memiliki kekayaan, industrialisasi maupun pendidikan yang tinggi akan cenderung mengembangkan dan mempertahankan kelembagaan yang demokratis (Fritzsche & Vogler, 2020).

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh variabel sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi dan kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi yang terdapat KEK di Indonesia. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel sosial (RLS dan penduduk bekerja), ekonomi (PMA dan PMDN), infrastruktur (panjang jalan) dan teknologi serta penggunaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai perwakilan kelembagaan dalam melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di 15 provinsi yang terdapat KEK di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam strategi Indonesia menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh daerah di Indonesia, kebijakan terkait keberadaan KEK di daerah juga harus mempertimbangkan dari keadaan fundamental daerah tersebut. Dengan ditemukannya kesenjangan dampak keberadaan pada provinsi yang terdapat KEK dan non-KEK menunjukkan bahwa ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan kelembagaan yang diasumsikan turut andil memberikan pengaruhnya.



## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada analisis data statistik yang dapat diukur. Pendekatan ini dimaksudkan guna mengetahui sebab-akibat (eksplanatori) antara variabel dependen dan independen. Lokasi penelitian ini berfokus pada 15 provinsi yang terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dan dalam rentang waktu 2016-2023. Pemilihan 15 provinsi yang terdapat KEK di Indonesia menjadi lokasi penelitian ini mempertimbangkan pendirian KEK di sejumlah provinsi yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah untuk kemajuan nasional. Dengan demikian, diperoleh total sampel penelitian sebesar 120 observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria adalah provinsi di Indonesia yang telah memiliki KEK serta memiliki kelengkapan data variabel penelitian dalam rentang 2016-2023.

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), artikel, buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah SEM-PLS dengan memanfaatkan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Metode SEM-PLS ialah metode yang dapat menganalisis persamaan struktural SEM berbasis varian dan dapat melakukan pengujian model pengukuran (Outer Model) dan model struktural (Inner Model) (Hair et al., 2021). Metode ini mampu menganalisis lebih efisien hubungan dengan banyak konstruk dalam satu model (Hair et al., 2019). Selain itu, metode SEM-PLS ini juga dapat mengantisipasi data yang tidak berdistribusi normal karena tidak memerlukan asumsi normalitas (Chin, 1998) serta dapat digunakan pada penelitian dengan total sampel yang kecil (Ringle et al., 2012). Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Sumber
Sosial	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Akumulasi lamanya waktu penduduk berusia 15 tahun ke atas menempuh pendidikannya.	BPS Indonesia
	Penduduk Bekerja (PB)	Penduduk yang usianya termasuk angkatan kerja dan saat ini sedang bekerja.	BPS Indonesia
Ekonomi	Penanaman Modal Asing (PMA)	Akumulasi dana yang berasal dari investor asing dalam satu periode tertentu.	BKPM
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah total dana yang berasal dari investor dalam negeri dalam satu periode tertentu.	BKPM
Infrastruktur	Panjang Jalan (PJ)	Akumulasi panjangnya jalan yang tercatat dan terukur pada suatu wilayah menurut provinsi.	BPS Indonesia
Teknologi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	Instrumen pengukuran yang merepresntasikan capaian pembangunan TIK suatu daerah yang dapat mencerminkan komunikasi, kesehatan digital dan potensi pengembangan TIK suatu daerah.	BPS Indonesia
Kelembagaan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tiga aspek utama demokrasi yakni, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi	BPS Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per Kapita (PDRB_KPT)	Rata-rata produk domestik dari setiap individu di suatu daerah yang dapat memperkirakan estimasi nilai barang dan jasa yang dapat diterimanya.	BPS Indonesia

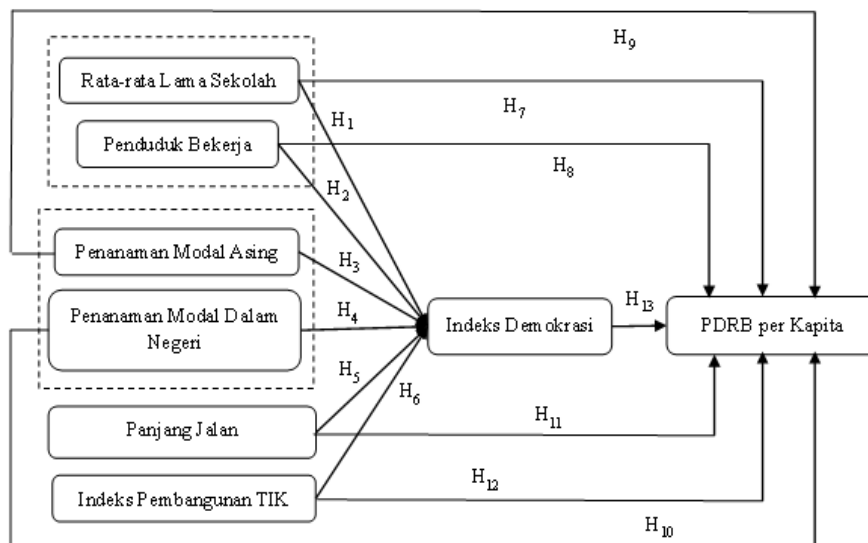
Variabel sosial dalam penelitian ini diwakili oleh RLS dan PB yang diasumsikan merupakan indikator tunggal (manifest variable) pembentuk konstruk sosial. Variabel ekonomi diwakili oleh PMA dan PMDN diasumsikan sebagai indikator tunggal pembentuk konstruk ekonomi. Panjang Jalan (PJ) diasumsikan sebagai indikator tunggal pembentuk konstruk infrastruktur yang membentuk ketersediaan dan cakupan fisik infrastruktur jalan. Kemudian, teknologi yang diwakili oleh IPTIK diasumsikan membentuk tingkat perkembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai indikator tunggal pembentuk konstruk teknologi. Serta, IDI diasumsikan membentuk kualitas kelembagaan yang pada level demokrasi terdapat perubahan maka akan berdampak langsung pada kualitas kelembagaan sebagai indikator tunggal pembentuk konstruk kelembagaan.

### 2.2 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini berfokus variabel yang diasumsikan memengaruhi PDRB per Kapita di 15 provinsi yang terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia tahun 2016-2023. Kelembagaan dalam penelitian ini diprosikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita adalah faktor sosial, ekonomi, infrastruktur, dan teknologi. Kerangka penelitian berikut dapat menjelaskan bahwa PDRB per Kapita merupakan proksi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada teori-teori yang di penelitian ini, adapun kerangka penelitian dalam penelitian adalah



sebagai berikut.



**Gambar 2.** Kerangka Penelitian

Sehubungan dengan Gambar 2. hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini yakni, variabel sosial (RLS dan PB), variabel ekonomi (PMA dan PMDN) diduga memiliki pengaruh terhadap IDI (H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>, H<sub>4</sub>). Pada variabel infrastruktur, PJ diasumsikan pula berpengaruh terhadap IDI (H<sub>5</sub>). Serta mengasumsikan IPTIK berpengaruh terhadap IDI (H<sub>6</sub>). Lebih lanjut, model ini turut menguji pengaruh variabel sosio-ekonomi terhadap PDRB per Kapita (H<sub>7</sub>, H<sub>8</sub>, H<sub>9</sub>, H<sub>10</sub>) maupun pengaruh variabel PJ dan IPTIK pada PDRB per Kapita (H<sub>11</sub> dan H<sub>12</sub>). Lalu, IDI yang diduga memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita (H<sub>13</sub>).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Dalam model dengan bentuk konstruk formatif mengasumsikan bahwasannya indikator menjadi penyebab adanya perubahan dalam variabel laten. Terdapat dua pengujian dalam model pengukuran (outer model) dengan konstruk formatif, yakni signifikansi indicator weight dan multikolinearitas. Adapun pengujiannya sebagai berikut.

##### 3.1.1 Signifikansi Indicator Weight

Pertama-tama guna memastikan pengukuran yang digunakan sudah sesuai dan layak dilakukan uji signifikansi. Uji ini dilakukan guna mengukur masing-masing indikator penyusun konstruk dalam penelitian. Nilai indicator weight pada konstruk formatif harus signifikan yang dilihat dari p-value <0,05. Adapun hasil uji signifikansi indicator weight sebagai berikut.

**Tabel 2.** Hasil Uji Signifikansi Indicator Weight

Variabel	Outer Weight	p-value
RLS	1.000	<0.001
PB	1.000	<0.001
PMA	1.000	<0.001
PMDN	1.000	<0.001
PJ	1.000	<0.001
IPTIK	1.000	<0.001
IDI	1.000	<0.001
PDRB_KPT	1.000	<0.001

Mengacu pada Tabel 2, diperoleh nilai outer weight dari masing-masing variabel sebesar 1,000 dengan nilai signifikansi outer weight setiap variabel adalah <0,001 yang mana p-value < 0,005. Artinya variabel Rata-rata Lama Sekolah, Penduduk Bekerja, PMA, PMDN, PJ, IPTIK, IDI dan PDRB per Kapita signifikan. Dengan demikian, penggunaan variabel RLS, PB, PMA, PMDN, PJ, IPTIK, IDI, dan PDRB\_KPT sebagai indikator tunggal (manifest variable) telah valid mewakili variabel itu sendiri.

##### 3.1.2 Uji Multikolinearitas

Setelah diperoleh hasil nilai indicator weight yang signifikan maka selanjutnya dilakukan uji multikolienaritas. Uji ini untuk melihat besarnya Variance Inflation Factor (VIF) variabel apakah terdapat masalah multikolinearitas atau tidak.



**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF
RLS	0.000
PB	0.000
PMA	0.000
PMDN	0.000
PJ	0.000
IPTIK	0.000
IDI	0.000
PDRB KPT	0.000

Berdasarkan Tabel 3., nilai VIF dari setiap variabel RLS, PB, PMA, PMDN, PJ, IPTIK, IDI, dan PDRB\_KPT sebesar 0,000. Dengan demikian, tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel.

**3.1.3 Uji Kecocokan Model atau Model Fit**

Tahapan selanjutnya setelah pengujian model pengukuran adalah uji kecocokan model. Uji ini dilakukan guna menilai konsistensi kecocokan dari model SEM-PLS dengan data yang sebenarnya. Adapun hasil uji kecocokan model dalam penelitian ini sebagai berikut.

**Tabel 4.** Hasil Uji Kecocokan Model atau Model Fit

Average path coefficient (APC) = 0.219, P =0.003
Average R-squared (ARS) = 0.506, P <0.001
Average adjusted R-squared (AARS) = 0.478, P <0.001
Average block VIF (AVIF) = 2.103, (acceptable if ≤5, ideally ≥3.3)
Average full collinearity VIF (AFVIF) = 2.586 (acceptable if ≤5, ideally ≥3.3)
Tenenhaus GoF (GoF) = 0.712, (small ≥0.1, medium ≥0.25, large ≥0.36)

Mengacu pada Tabel 4, besarnya kekuatan hubungan antar variabel secara rata-rata (APC) menunjukkan hubungan yang baik dengan nilai probabilitas <0,05. Kemudian, rata-rata variabel independen (ARS) menunjukkan nilai sebesar 0,506 yang berarti variabel RLS, PB, PMA, PMDN, IPTIK, PJ, dan IDI dapat menjelaskan 50,6 persen PDRB\_KPT dengan nilai probabilitas <0,01. Besarnya nilai AARS yakni 0,478 menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan model yang didasarkan pada variabel independen yang digunakan sesuai. Tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model dilihat dari Nilai AVIF sebesar 2,103 dan nilai AFVIF sebesar 2,586. Sementara, Nilai GoF sebesar 0,712 menunjukkan bahwa model penelitian secara koheren kuat dan sangat baik dengan nilai ≥0,36.

**3.1.4 Effect Sizes atau Partial F-test**

Uji ini dilakukan untuk mengestimasi besarnya variabel dependen dipengaruhi setiap variabel independen. Pada metode SEM-PLS, effect sizes dikelompokan menjadi lemah (0,02), medium (0,15) dan kuat (0,35).

**Tabel 5.** Nilai Effect Sizes

	RLS	PB	PMA	PMDN	IPTIK	PJ	IDI	PDRB_KPT
IDI	0.005	0.012	0.066	0.041	0.277	0.028		
PDRB_KPT	0.220	0.113	0.054	0.095	0.107	0.028	0.001	

Mengacu pada Tabel 5, variabel dengan kategori medium yakni, IPTIK terhadap IDI dan RLS terhadap PDRB\_KPT. Variabel kategori lemah adalah RLS terhadap IDI, PB terhadap IDI, PJ terhadap IDI, PMA terhadap PDRB\_KPT, PMDN terhadap PDRB\_KPT, IPTIK terhadap PDRB\_KPT, PJ terhadap PDRB\_KPT dan IDI terhadap PDRB per Kapita.

**3.1.5 Predictive Relevance atau Q<sup>2</sup>**

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan prediksi yang relevan suatu model. Nilai Q-squared >0 artinya model mampu memprediksi secara relevan atau variabel independen memiliki kemampuan memprediksi variabel dependen. Apabila nilai Q<sup>2</sup> ≤0 berarti model tidak memiliki kemampuan memprediksi secara relevan.

**Tabel 6.** Nilai Predictive Relevance

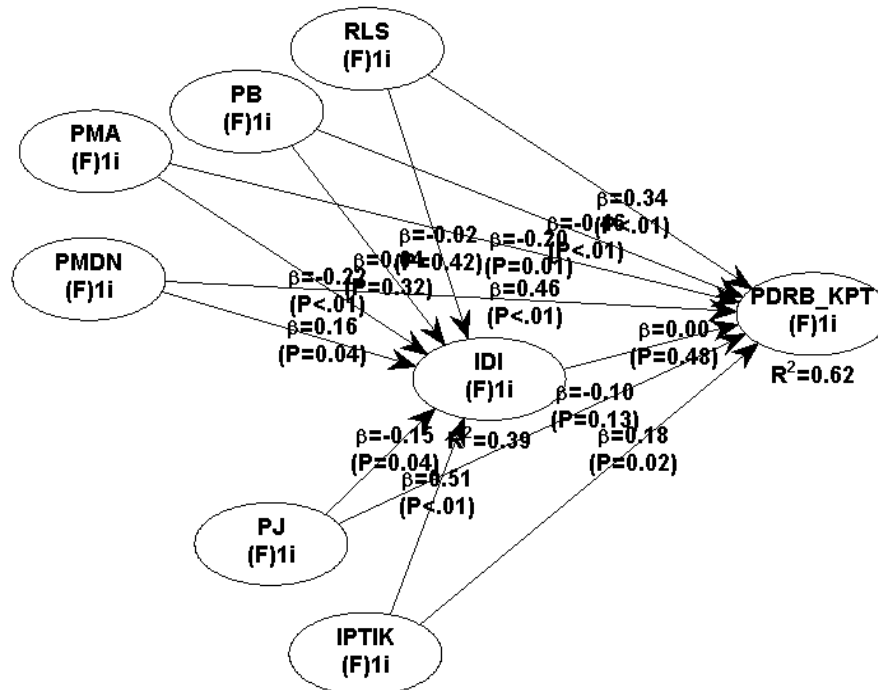
	IDI	PDRB_KPT
Q-squared	0.429	0.615

Mengacu pada Tabel 6, nilai Q-squared IDI dan PDRB\_KPT masing-masing lebih dari 0 (nol) yang artinya pembentukan model sudah tepat dan variabel yang digunakan mampu memprediksi secara relevan.

**3.2. Uji Hipotesis**



Uji ini dilakukan guna menguji kebenaran praduga hipotesis atau penelitian yang dapat dilihat dari hasil path coefficient dan nilai probabilitasnya. Adapun hasil uji hipotesis sebagai berikut.



**Gambar 3.** Hasil Uji Hipotesis

Mengacu pada Gambar 3. diketahui variabel sosial (RLS dan PB) masing-masing terbukti tidak berpengaruh terhadap IDI dengan masing-masing p-value 0,42 dan 0,32 sehingga  $H_1$  dan  $H_2$  ditolak. Sementara itu, variabel ekonomi (PMA dan PMDN), PJ, dan IPTIK terbukti berpengaruh terhadap IDI dengan masing-masing p-value  $< 0,01$ , 0,04, 0,04, dan  $< 0,01$  sehingga  $H_3$ ,  $H_4$ ,  $H_5$ ,  $H_6$  diterima. Lebih lanjut, RLS dan PB sebagai variabel sosial masing-masing terbukti berpengaruh terhadap PDRB per Kapita dengan p-value keduanya  $< 0,01$  sehingga  $H_7$  dan  $H_8$  diterima. Begitu pula variabel ekonomi (PMA dan PMDN) terbukti berpengaruh terhadap PDRB per Kapita dengan p-value 0,01 dan  $< 0,01$  sehingga  $H_9$  dan  $H_{10}$  diterima. Serta IPTIK yang terbukti berpengaruh terhadap PDRB per Kapita dengan p-value 0,02 sehingga  $H_{12}$  diterima. Akan tetapi, PJ dan IDI terbukti tidak berpengaruh terhadap PDRB per Kapita dengan masing-masing p-value 0,13 dan 0,48 sehingga  $H_{11}$  dan  $H_{13}$  ditolak.

### 3.3. Pembahasan

Keberadaan KEK tidak hanya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi melainkan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak salah satunya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan KEK dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil secara profesional yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal. Berdasarkan Gambar 3, didapatkan informasi bahwa RLS tidak berpengaruh terhadap Indeks Demokrasi (IDI). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien -0,02 dan p-value sebesar 0,42. Dengan demikian,  $H_1$  ditolak. Secara teoritis menurut Teori Modernisasi yang dikemukakan Lipset, pendidikan adalah salah satu modal manusia fundamental yang merupakan prasyarat penting dapat terjadinya demokrasi. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan kebalikan dari Teori Modernisasi bahwa peningkatan pendidikan atau lama waktu mengenyam pendidikan individu tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik dan perilaku demokratis individu. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku demokratis atau kesadaran berpartisipasi politik individu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan atau lamanya waktu tempuh pendidikan formal saja melainkan juga dari latar belakang keluarga, lingkungan, sosial-ekonomi, hingga pada metode pengajaran atau kurikulum di sekolah (Teegelbeckers et al., 2023). Merujuk pada Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikemukakan oleh Acemoglu dan Robinson, tidak berpengaruhnya RLS terhadap IDI mengindikasikan bahwa pada provinsi-provinsi yang terdapat KEK adanya kecenderungan lembaga ekstraktif yang mana peningkatan pendidikan yang dalam konteks ini RLS terkonsentrasi pada kepentingan ekonomi eksklusif untuk KEK semata. Lamanya individu mengenyam pendidikan formal dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya tenaga kerja profesional yang mendukung operasional industri KEK bukan mendorong perilaku individu untuk berpartisipasi politik. Selain itu, temuan ini dapat dijelaskan juga dengan Teori Ekonomi Kelembagaan North terkait efektivitas kebijakan publik dan ketidakpastian. Provinsi-provinsi yang terdapat KEK cenderung lebih mengutamakan kestabilan bisnis daripada partisipasi politik sebagaimana tujuan pendirian KEK sehingga pendidikan atau lama waktu mengenyam pendidikan individu hanya untuk melatih sumber daya manusia bekerja dengan baik bukan menjadikan individu lebih demokratis. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Männistö &



Moate, (2024); Österman & Robinson, (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap demokrasi.

Penduduk bekerja (PB) merupakan salah satu indikator variabel sosial yang dapat merefleksikan kuantitas dan pemanfaatan modal manusia. Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PB tidak berpengaruh terhadap IDI. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,04 dan p-value sebesar 0,32 sehingga  $H_2$  ditolak. Menurut Teori Modernisasi Lipset, penduduk yang bekerja mengindikasikan terdapat peningkatan serapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran yang mengurangi ketidakpuasan publik dan meningkatkan stabilitas sosial. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya bahwa PB tidak memiliki pengaruh terhadap demokrasi. Hasil penelitian yang memiliki koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan PB tidak secara langsung dapat meningkatkan indeks demokrasi daerah tanpa disertai oleh faktor-faktor lain seperti, kualitas pendidikan dan urbanisasi (Pramesti & Hasmarini, 2025). Selain itu, lingkungan pekerjaan turut berperan dalam mendorong individu berpartisipasi politik yang prodemokrasi (Nurlinah et al., 2021). Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan oleh Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson terkait adanya lembaga ekstraktif pada provinsi-provinsi yang terdapat KEK. Menurut Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, temuan ini mengindikasikan bahwa pada provinsi-provinsi yang terdapat KEK, PB lebih berorientasi pada produktivitas ekonomi KEK daripada partisipasi masyarakat dalam proses politik sehingga PB tidak memiliki kesempatan dan akses dalam partisipasi politik yang demokratis. Selain itu, dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North PB yang tidak berpengaruh terhadap IDI mengindikasikan bahwa kelembagaan yang ekstraktif lebih mengutamakan kepentingan dan stabilitas ekonomi daripada menciptakan tenaga kerja yang memiliki kesempatan berpartisipasi politik yang demokratis. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Duman, (2025); Trentini, (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan PB tidak berpengaruh dalam meningkatkan demokrasi apabila tidak adanya mekanisme kelembagaan yang memadai untuk menciptakan partisipasi politik yang prodemokrasi.

Sebagai negara yang termasuk ke dalam kategori middle income country, faktor ekonomi memiliki peran krusial dalam menyediakan modal tambahan untuk investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu variabel ekonomi yang dapat merefleksikan kondisi dan perkembangan ekonomi suatu negara adalah dari aktivitas investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PMA memiliki pengaruh terhadap IDI. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien -0,02 dan p-value <0,01 sehingga  $H_3$  diterima. Nilai koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PMA berdampak pada penurunan IDI. Ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, dalam pelaksanaan kelembagaan terdapat dua kategori struktur kekuasaan lembaga yang dalam konteks hasil penelitian ini ialah terdapat lembaga ekstraktif yang membatasi penegakan hukum yang jelas dan partisipasi politik yang prodemokrasi (Garoupa & Spruk, 2024). Kelembagaan yang lebih demokratis menjamin adanya supremasi hukum, regulasi jelas serta transparansi pemerintah yang dapat mendorong para investor lebih percaya dan merasa terjamin menanamkan modalnya. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa guna menjaga kepercayaan investor asing, pemerintah daerah mendorong terbentuknya struktur kekuasaan yang ekstraktif supaya penegakan hukum dan regulasi terkonsentrasi pada perlindungan investasi asing yang membatasi terjadinya partisipasi politik masyarakat lokal. Lebih lanjut, menurut Teori Ekonomi Kelembagaan North PMA yang bersifat dominan sebagai sumber pendanaan disuatu daerah cenderung menciptakan ketergantungan ekonomi yang menyebabkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan insentif bagi investor asing yang di sisi lain tidak memperhatikan partisipasi politik masyarakat lokal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Biglaiser dkk., (2024) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara PMA dengan demokrasi.

Variabel ekonomi selain PMA ialah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN turut berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui mekanisme insentif domestik. Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PMDN memiliki pengaruh terhadap Indeks Demokrasi. Hal ini dilihat dari nilai koefisien 0,16 dan p-value 0,04 sehingga  $H_4$  diterima. Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan PMDN dapat meningkatkan pula demokrasi. Temuan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2016-2023 terjadi akumulasi modal dan pertumbuhan investor domestik di provinsi-provinsi yang terdapat KEK yang mendorong investor domestik menuntut adanya keadilan dan tanpa diskriminasi yang mendorong peningkatan aspek partisipasi demokratis dan kebebasan sipil dalam demokrasi. Secara teoritis, temuan ini dapat mengonfirmasi Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson yang mengasumsikan bahwa terdapat dua kategori dalam struktur kekuasaan lembaga yang dalam konteks hasil penelitian ini ialah terdapat lembaga inklusif yang menjamin adanya penegakan hukum yang adil, akuntabilitas publik serta regulasi jelas yang mendorong investasi (Khuan et al., 2025). Selain itu, dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North investor domestik memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kepentingan ekonomi maupun stabilitas sosial. Sehingga, temuan ini menunjukkan PMDN lebih berperan dalam menciptakan kelembagaan yang sehat dibandingkan PMA karena investor domestik termasuk ke dalam kelompok kepentingan pada struktur sosial-politik daerah yang turut mempengaruhi keputusan pemerintah daerah memutuskan suatu kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidri, (2025) mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa PMDN yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi demokrasi di suatu daerah.

Panjang jalan (PJ) adalah salah satu bentuk modal publik yang berfungsi sebagai saluran utama untuk memecah isolasi geografis dan sosial pada daerah-daerah yang jauh dari pusat perekonomian maupun administrasi (Nairobi et al., 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PJ memiliki pengaruh terhadap IDI. Hal ini dilihat dari nilai koefisien -0,15 dan p-value 0,04 sehingga  $H_5$  diterima. Secara teoritis, menurut Teori Modernisasi Lipset,



infrastruktur panjang jalan merupakan salah satu prasyarat penting untuk membentuk masyarakat yang lebih terinformasi dan aktif berorganisasi sekaligus dapat meningkatkan efisiensi operasional kelembagaan (pemerintah) dalam melakukan berbagai layanan publik, mendistribusikan sumber daya dan memonitor pelaksanaan hukum. Namun, hal sebaliknya terjadi apabila dilihat dari nilai koefisien yang negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan panjang jalan justru menurunkan demokrasi. Dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North, adanya hubungan yang negatif antara panjang jalan dengan demokrasi dalam temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan panjang jalan di daerah hanya dirasakan oleh lembaga dengan kekuasaan ekstraktif guna memperkuat kendali dan kekuasaan (Fritzsche & Vogler, 2020). Lembaga ekstraktif mengendalikan sumber daya negara termasuk jalan untuk memperluas kekuasaan, mempertahankan pendapatan kendati membangun lembaga yang transparansi yang terbuka terhadap demokrasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bathla, (2025); González dkk., (2025) menyatakan bahwa peningkatan PJ menurunkan demokrasi daerah akibat adanya pemusatan kekuasaan oleh lembaga ekstraktif. Dengan demikian, hasil penelitian inipun memberikan kontribusi baru terkait pengaruh peningkatan infrastruktur PJ di KEK yang masih terpusat pada kekuasaan lembaga ekstraktif daripada lembaga yang mendukung transparansi dan demokrasi.

Pada era modern saat ini, teknologi menjadi instrumen fundamental yang tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh individu, melainkan juga kelembagaan (Saba et al., 2024). TIK memberikan peluang dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang dapat meningkatkan pula kualitas kelembagaan termasuk indeks demokrasi daerah (Pradhan et al., 2022). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) memiliki pengaruh terhadap IDI. Hal ini dilihat dari nilai koefisien 0,51 dan p-value <0,01 sehingga  $H_6$  diterima. Secara interpretasi teoritis, hasil temuan ini dapat dijelaskan dengan Teori Modernisasi Lipset. Merujuk pada Teori Modernisasi Lipset, IPTIK yang berpengaruh terhadap IDI mengindikasikan bahwa kemajuan sosio-ekonomi termasuk kemajuan TIK dapat mendorong peningkatan nilai demokrasi. Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa perkembangan akses internet dan teknologi di daerah KEK menciptakan kemudahan dalam pengaksesan informasi politik oleh masyarakat yang lebih lanjut mendorong masyarakat berpartisipasi politik. Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, temuan ini menunjukkan bahwa IPTIK dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan ataupun dominasi kekuasaan akibat adanya akuntabilitas dan transparansi kelembagaan yang menciptakan lembaga inklusif. Di sisi lain, menurut Teori Ekonomi Kelembagaan North temuan ini menunjukkan bahwa IPTIK sebagai instrumen yang secara cepat dan masif dapat mengurangi biaya transaksi terkait dengan informasi dan komunikasi politik. TIK memberikan peluang dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang dapat meningkatkan pula kualitas kelembagaan termasuk indeks demokrasi daerah (Pradhan et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ben Ali, (2020); Dossou dkk., (2025); Setor dkk., (2021) menyatakan bahwa TIK memiliki pengaruh terhadap demokrasi.

Peningkatan RLS secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah (Windhani et al., 2023). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa RLS berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,34 dan p-value <0,01 sehingga  $H_7$  diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan atau lamanya waktu mengenyam pendidikan formal di provinsi-provinsi yang terdapat KEK menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi baru. Temuan inipun selaras dengan Teori Pertumbuhan Endogen yang mengungkapkan bahwa investasi dalam pendidikan yang dalam penelitian ini tercermin melalui RLS berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kontinu. Modal manusia dapat diartikan sebagai nilai ekonomi yang mana diperoleh individu dari pengetahuan dan keterampilan kerja selama menempuh pendidikan formal yang berkontribusi tidak hanya pada kekayaan individu melainkan juga pada kekayaan masyarakat (Lozano, 2025). Menurut Mankiw, (2013) pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang salah satunya ditentukan oleh pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tersebut menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Temuan ini menunjukkan lamanya waktu yang ditempuh individu dalam pendidikan formal pada provinsi yang terdapat KEK menciptakan individu yang lebih terampil melalui limpahan pengetahuan yang mendorong kemampuan untuk menyerap teknologi baru serta beradaptasi dengan proses produksi kompleks dan memahami rantai nilai global yang sangat penting dalam KEK. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anshori dkk., (2025); Litriani, (2021); Yin dkk., (2024) turut menyatakan bahwa RLS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan bagi PDRB per Kapita.

Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PB berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dilihat dari nilai koefisien -0,46 dan p-value <0,01 sehingga  $H_8$  diterima. Meskipun nilai koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan PB justru menurunkan PDRB per Kapita di provinsi yang terdapat KEK, temuan ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen terkait kualitas modal manusia. Pada provinsi-provinsi yang terdapat KEK, peningkatan penduduk bekerja tanpa dibarengi dengan peningkatan keterampilan kerja justru dapat menurunkan produktivitas yang berdampak pada banyaknya penduduk bekerja yang terserap di sektor dengan nilai tambah rendah ataupun pengangguran terselubung (Chairunissa, 2022). Ketika penduduk bekerja yang meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk bekerja yang salah satunya tercermin dalam pendidikan maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Dalam sudut pandang Teori Pertumbuhan Endogen investasi dalam pendidikan mendorong terciptanya pertumbuhan per kapita yang berkelanjutan dengan menghasilkan tenaga kerja yang lebih berpengetahuan dan efisien (Keshminder et al., 2025). Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan North, temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian insentif di KEK dengan ketersediaan



lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. PB di provinsi-provinsi yang terdapat KEK. KEK yang menyerap tenaga kerja dari luar daerah atau ekspatriat untuk posisi strategis di KEK sedangkan di sisi lain masyarakat lokal hanya mengisi posisi pekerjaan administratif atau rendah menyebabkan penduduk yang bekerja tidak memberikan dampak positif terhadap PDRB per Kapita provinsi tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ammara dkk., (2025) sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hasil penelitian ini menegaskan fokus daripada Teori Pertumbuhan Endogen yang berfokus pada kualitas modal manusia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada negara berkembang PMA menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencapai produktivitas dan standar hidup lebih baik pada pembangunan ekonomi regional (Liang et al., 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PMA memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien  $-0,20$  dan  $p$ -value  $0,01$  sehingga  $H_0$  diterima.. Secara interpretasi teoritis, menurut Teori Pertumbuhan Endogen peran dari PMA adalah memberikan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan keterampilan dan mutu SDM serta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan kebalikannya bahwa nilai koefisien yang negatif mengindikasikan peningkatan PMA di provinsi yang terdapat KEK justru menurunkan PDRB per Kapita. Adanya hambatan dalam penyebaran manfaat PMA terhadap PDRB per Kapita ini dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson. Dari sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat karakteristik lembaga ekstraktif yang mana manfaat dari investasi asing hanya terisolasi di dalam KEK (enclave). PMA di KEK yang terisolasi (enclave) dengan perekonomian lokal berakibat membatasi efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi bagi masyarakat karena hanya dapat dirasakan manfaatnya di dalam KEK itu sendiri. Dengan demikian, manfaat keberadaan PMA ini menjadi terbatas pada wilayah KEK dan tidak meluas kepada masyarakat maupun perekonomian lokal di provinsi tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sa'dia & Fitriady, (2023); Zeng, (2021) menyatakan bahwa PMA pada KEK yang terisolasi (enclave) dengan perekonomian lokal provinsi tempat KEK berdiri dapat menurunkan PDRB per kapita provinsi karena manfaatnya hanya dirasakan di dalam KEK itu sendiri.

Peningkatan PMDN berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat, kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih lanjut mendorong pertumbuhan ekonomi (Purba, 2020). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PMDN berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien  $0,46$  dan  $p$ -value  $<0,01$  sehingga  $H_{10}$  diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa akumulasi modal yang berasal dari investor domestik memberikan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi yang dapat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara teoritis menurut Teori Pertumbuhan Endogen, investasi modal yang dibarengi dengan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kontinuitas. PMDN yang memiliki pengaruh positif signifikan menggambarkan bahwa investasi domestik menghasilkan efek limpahan pengetahuan, transfer teknologi dan memiliki keterkaitan dengan perekonomian lokal sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih lanjut pendapatan per kapita masyarakat. Berbeda dengan PMA yang cenderung terisolasi, masuknya PMDN yang bersifat tidak terisolasi (non-enclave) dengan perekonomian lokal dapat meningkatkan produktivitas masyarakat lokal karena manfaat dari investasi domestik ini tidak terbatas hanya dirasakan oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saja. Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, nilai koefisien yang positif ini mengindikasikan bahwa investor domestik memiliki kepentingan jangka panjang akan penegakan hukum yang adil dan stabilitas kebijakan sehingga mendorong terciptanya lembaga yang inklusif sehingga pada tahun 2016-2023 pada provinsi yang terdapat KEK investasi domestik lebih peran dalam menciptakan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi daripada investasi asing. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dkk., (2020); Zahra dkk., (2025) sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa PMDN berpengaruh terhadap PDRB per Kapita..

Infrastruktur panjang jalan (PJ) memudahkan interaksi antar pelaku ekonomi serta memfasilitasi aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial penting lain yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Khanani et al., 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PJ tidak berpengaruh pada PDRB per Kapita. Di buktikan oleh nilai koefisien  $-0,10$  dan  $p$ -value  $0,13$  sehingga  $H_{11}$  ditolak. Dalam Teori Pertumbuhan Endogen, PJ dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong peningkatan output per kapita yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya bahwa PJ tidak serta merta berdampak pula pada produktivitas masyarakat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK. Tidak berpengaruhnya PJ terhadap kesejahteraan ekonomi ini dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Kelembagaan North. Dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North, PJ yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di provinsi KEK mengindikasikan penambahan panjang jalan di provinsi KEK belum dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan memudahkan aksesibilitas masyarakat yang mendorong peningkatan PDRB per Kapita. Biaya transaksi yang timbul serta inefisiensi kelembagaan sebagai dari hambatan aksesibilitas tersebut berpotensi merugikan atau menurunkan manfaat sosial dan ekonomi dari penambahan PJ (Medeiros et al., 2026). Temuan penelitian tidak berpengaruh ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanum dkk., (2025); Irwandi dkk., (2025); Primanto & Undang, (2022) yang menyatakan bahwa PJ tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam era digitalisasi dewasa ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi instrumen esensial bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan negara maupun daerah (Jiao & Sun, 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini



dibuktikan dengan nilai koefisien 0,18 dan p-value 0,02 sehingga  $H_{12}$  diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa modal TIK yang terdapat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi Teori Pertumbuhan Endogen yang memandang teknologi sebagai modal endogen yang berperan memberikan efek limpahan sehingga dapat meningkatkan produktivitas modal fisik (penduduk kerja). Modal TIK dan infrastruktur TIK memberikan efek limpahan pengetahuan berbasis teknologi yang berperan besar dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Keshminder et al., 2025). Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan North, IPTIK yang berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK dapat menurunkan biaya transaksi sehingga tercipta efisiensi dalam distribusi barang dan jasa bagi para pelaku ekonomi dalam masyarakat lokal (Yu et al., 2022). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Behera dkk., (2024); Kumari & Singh, (2024); Tripathi & Inani, (2020) yang mengungkapkan bahwa indeks TIK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih lanjut berdampak pada PDRB per Kapita.

Kelembagaan berperan menciptakan stabilitas sosial-politik, mengkoordinasi dan mengatur supremasi hukum maupun aktivitas antar pelaku ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Uddin et al., 2023). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa Indeks Demokrasi (IDI) tidak berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal tersebut dilihat dari nilai koefisien 0,00 dan p-value 0,48 sehingga  $H_{13}$  ditolak. Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa dampak peningkatan IDI tidak secara berkesinambungan meningkatkan PDRB per Kapita pula. Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan North, kelembagaan berperan dalam meminimalisir ketidakpastian dan memastikan stabilitas agar iklim perekonomian baik dalam jangka panjang (North, 1990). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDI yang terdiri atas kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga birokrasi belum mampu menurunkan biaya transaksi ekonomi di provinsi-provinsi yang terdapat KEK karena tidak disertai dengan penegakan hukum dan regulasi yang kuat, birokrasi yang efisien hingga kestabilan kebijakan yang masih didominasi oleh kepentingan ekstraktif. Di sisi lain, menurut Teori Pertumbuhan Endogen kelembagaan berperan sebagai saluran pendorong akumulasi modal dan limpahan pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa dampak peningkatan IDI belum mampu mendorong terciptanya eksternalitas positif bagi produktivitas perekonomian masyarakat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK. Hal ini diperkuat juga dengan pandangan Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson bahwa tanpa lembaga yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan tetap lemah dan masih didominasi oleh indikator lain yang memiliki dampak nyata secara langsung. Temuan penelitian oleh Sijabat, (2024) mendukung temuan penelitian ini yang mengungkapkan bahwa IDI memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap PDRB per Kapita.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti, sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi serta kelembagaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) berpengaruh positif terhadap Indeks Demokrasi (IDI). Sebaliknya, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Panjang Jalan (PJ) berpengaruh negatif terhadap IDI, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Penduduk Bekerja (PB) tidak berpengaruh terhadap IDI. Pengaruh positif PMDN dan IPTIK mengindikasikan bahwa perkembangan investasi domestik dan TIK dapat meningkatkan partisipasi politik yang lebih demokratis melalui kemudahan akses informasi politik dalam rangka pengambilan sebuah keputusan. Sementara itu, PMA dan PJ yang berpengaruh negatif mengindikasikan bahwa investasi asing dan penambahan PJ di provinsi-provinsi yang terdapat KEK lebih berorientasi pada aktivitas ekonomi KEK semata. RLS yang tidak berpengaruh terhadap IDI menunjukkan bahwa perilaku demokratis individu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan atau lamanya waktu pendidikan formal yang ditempuh melainkan juga oleh faktor-faktor lain seperti, latar belakang keluarga, lingkungan, sosial-ekonomi, hingga pada metode pengajaran atau kurikulum di sekolah. PB yang juga tidak memiliki pengaruh terhadap IDI mengindikasikan bahwa aktivitas di KEK lebih berorientasi pada produktivitas ekonomi KEK daripada partisipasi masyarakat dalam proses politik. Di sisi lain, ditemukan bahwa RLS, PMDN dan IPTIK berpengaruh positif terhadap PDRB per Kapita yang mana sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen mengenai pentingnya akumulasi modal manusia, fisik, dan teknologi. Akan tetapi, diketahui PB dan PMA berpengaruh negatif serta PJ dan IDI yang tidak berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. PB dan PMA yang berdampak negatif menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di KEK cenderung didominasi oleh sektor dengan produktivitas rendah maupun investasi asing yang masih bersifat eksklusif dan terisolasi (enclave) yang tidak memberikan efek limpahan pada perekonomian lokal. PJ yang tidak berpengaruh mengindikasikan bahwa penambahan panjang jalan di provinsi KEK belum dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan memudahkan aksesibilitas masyarakat yang mendorong peningkatan PDRB per Kapita. Selain itu, IDI yang terbukti tidak memiliki pengaruh menunjukkan bahwa demokrasi pada peningkatan demokrasi belum secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan baru bahwa keberadaan KEK belum sepenuhnya memberikan efek limpahan terhadap perekonomian lokal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil ini mengindikasikan adanya kecenderungan aktivitas ekonomi KEK yang bersifat terisolasi (enclave). Dengan demikian, pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat memperkuat



keterkaitan antara KEK dengan perekonomian lokal melalui kuota pemasok lokal untuk memaksimalkan efek limpahan, kebijakan pengembangan profesional untuk KEK dengan melibatkan Danantara sebagai sumber pembiayaan dan dukungan investasi serta transparansi kegiatan dari KEK maupun pemerintah daerah dan pusat supaya keberadaan KEK tidak bersifat enclave dan dapat memberikan dampak pada perekonomian lokal. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan IDI sebagai proksi kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kualitas kelembagaan sehingga penelitian selanjutnya direkomendasikan turut menambahkan indikator kelembagaan lain seperti Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah maupun indikator kelembagaan lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan RLS sebagai variabel sosial untuk pendidikan sehingga penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan berdasarkan jenjang pendidikan tertentu seperti berdasarkan lulusan jenjang pendidikan universitas yang memiliki pengaruh lebih kuat terhadap partisipasi politik maupun pertumbuhan ekonomi secara mendalam.

## REFERENCES

- Al-kasasbeh, O., Alzghoul, A., & Alghraibeh, K. (2022). Global FDI inflows and outflows in emerging economies Post-COVID-19 era. *Future Business Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00167-z>
- Ammara, T. R., Syahnur, S., & Srinata, S. (2025). The Moderating Effect of Female Labor Force Participation on Economic Growth in ASEAN. *Ekonomikalia Journal of Economics*, 3(2), 93–105. <https://doi.org/10.60084/eje.v3i2.327>
- Anshori, W. Z., Winarti, A. S., Lufti, D., & Wijayanti, D. L. (2025). The Effect of Life Expectancy, Average Years of Schooling, and Total Labor Force on Gross Regional Domestic Product of Yogyakarta Special Region (2017-2023). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 6(1), 13–23. <https://doi.org/10.21107/bep.v6i1.29613>
- Anshori, W. Z., Winarti, A. S., & Wijayanti, D. L. (2025). The Effect of Life Expectancy, Average Years of Schooling, and Total Labor Force on Gross Regional Domestic Product of Yogyakarta Special Region (2017-2023). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 6(1), 13–23. <https://doi.org/10.21107/bep.v6i1.29613>
- Atake, E. H., Kolani, L., & Koriko, M. (2024). Human Capital, Underemployment, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02307-y>
- Bappenas. (2023). Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045\\_Final.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)
- Bathla, N. (2025). Authoritarian urbanism beyond the city: Infrastructure-led extended urbanisation and India's more-than-neoliberal configurations. *Urban Studies*, 62(15), 2993–3012. <https://doi.org/10.1177/00420980241309737>
- Behera, B., Haldar, A., & Sethi, N. (2024). Investigating the direct and indirect effects of Information and Communication Technology on economic growth in the emerging economies: role of financial development, foreign direct investment, innovation, and institutional quality. *Information Technology for Development*, 30(1), 33–56. <https://doi.org/10.1080/02681102.2023.2233463>
- Ben Ali, M. S. (2020). Does ICT promote democracy similarly in developed and developing countries? A linear and nonlinear panel threshold framework. *Telematics and Informatics*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101382>
- Bergantino, A. S., Fusco, G., & Intini, M. (2026). Are Special Economic Zone policies (SEZ) effective? An empirical analysis on the transport and logistics' sector. *Applied Economics*, 58(1), 157–171. <https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2450389>
- Biglaiser, G., Hunter, L. Y., & Lu, K. (2024). Chinese and US Overseas Foreign Direct Investment and Democracy in the Developing World. *Journal of Asian and African Studies*. <https://doi.org/10.1177/00219096241263965>
- Bonita, A. P. A., & Widyawati, D. (2020). Ukuran Pemerintah, Kualitas Institusi, dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(2), 7. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkeAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol15/iss2/7>
- Chairunissa, N. (2022). Endogenous Growth Factors In Four Categories Of Countries Based On Hdi Faktor Pertumbuhan Endogen Di Empat Kategori Negara Berdasarkan Ipm. 11, 567–583. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnalndms>
- Chen, J., Liu, M., Chang, C., & Wang, Y. (2023). State infrastructure and neighborhood well-being in urbanizing China. *Journal of Urban Affairs*. <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2157730>
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Contractor, F. J., Dangol, R., Nuruzzaman, N., & Raghunath, S. (2020). How do country regulations and business environment impact foreign direct investment (FDI) inflows? *International Business Review*, 29(2). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101640>
- Correa, E., & Esquivias, M. A. (2025). The impact of digitalization, education, and institutional quality on economic growth: A comparative analysis between Sub-Saharan Africa and Middle East Countries. *Social Sciences and Humanities Open*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101423>
- Desmarais-Tremblay, M., & Stojanović, A. (2022). Framing Institutional Choice, 1937–1973: New Institutional Economics and the Neglect of the Commons. *Review of Political Economy*, 34(4), 665–691. <https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2096284>
- Dirmayanti, N. I., & Damayanti, A. (2023). The Role of Special Economic Zones (SEZ) in the Formation of Club Convergence in Indonesia. 64th ISI World Statistics Congress.
- Dossou, T. A. M., Kambaye, E. N., Berhe, M. W., & Asongu, S. A. (2025). Moderating effect of ICT on the relationship between governance quality and income inequality in sub-Saharan Africa. *Information Development*, 41(2), 445–464. <https://doi.org/10.1177/02666669231170396>
- Duman, A. (2025). Informal Workers as Outsiders: Political Participation and Voice Across MENA Countries. *Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/00323217251315520>
- Fritzsche, E., & Vogler, A. (2020a). Why the confusion? Reasons and remedies for shortcomings and progress in modernization theory. *Democratization*, 27(7), 1261–1279. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1781093>
- Fritzsche, E., & Vogler, A. (2020b). Why the confusion? Reasons and remedies for shortcomings and progress in modernization theory. *Democratization*, 27(7), 1261–1279. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1781093>



- Gallé, J., Overbeck, D., Riedel, N., & Seidel, T. (2024). Place-based policies, structural change and female labor: Evidence from India's Special Economic Zones. *Journal of Public Economics*, 240, 105259. <https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2024.105259>
- Garoupa, N., & Spruk, R. (2024). Measuring Political Institutions in the Long Run: A Latent Variable Analysis of Political Regimes, 1810–2018. *Social Indicators Research*, 173(3), 867–914. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03364-1>
- GGGI. (2022). Indonesia Country Planning Framework.
- González, F., Miquel-Florensa, J., Prem, M., & Straub, S. (2025). The Dark Side of Infrastructure: Roads, Repression, and Land in Authoritarian Paraguay. *The Economic Journal*, 135(666), 653–669. <https://ssrn.com/abstract=4299001>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Classroom Companion: Business Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. In *European Business Review* (Vol. 31, Number 1, pp. 2–24). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hanum, N., Syahputra, R., & Sea, D. (2025). Pengaruh Infrastruktur Jalan dan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 19–32. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3220>
- Hardi, I., Ringga, E. S., Fijay, A. H., Maulana, A. R. R., Hadiyani, R., & Idroes, G. M. (2023). Decomposed Impact of Democracy on Indonesia's Economic Growth. *Ekonomikalia Journal of Economics*, 1(2), 51–60. <https://doi.org/10.60084/eje.v1i2.80>
- Hidri, S. (2025). Capital flight, institutional quality, and economic growth: Evidence from African economies. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 3776–3785. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.7387>
- Irwandi, H., Jamal, A., & Nasir, M. (2025). How Investment Mediates Infrastructure Effect on Economic Growth in Indonesia. *Grimsa Journal of Business and Economics Studies*, 2(2), 89–103. <https://doi.org/10.61975/gjbes.v2i2.59>
- Jiao, S., & Sun, Q. (2021). Digital economic development and its impact on economic growth in china: Research based on the perspective of sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810245>
- Julianto, D., & Mukhtar, R. (2022). Analisis Pengaruh Investasi Dan Jumlah Penduduk Yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2020. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 71–80. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i1.385>
- KADIN Indonesia. (2023). Peta Jalan (Road Map) Indonesia Emas 2045. <https://kadin.id/program/indonesia-emas/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Indonesia Emas 2045. <https://indonesia2045.go.id/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
- Keshminder, J. S., Woźniak, M., Kusa, R., Ridzuan, A. R., & Erum, N. (2025). Endogenous growth and the influence of information and communication technology on Poland's economic trajectory. *Open Research Europe*, 5. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.19945.1>
- Khanani, R. S., Adugbila, E. J., Martinez, J. A., & Pfeffer, K. (2021). The Impact of Road Infrastructure Development Projects on Local Communities in Peri-Urban Areas: The Case of Kisumu, Kenya and Accra, Ghana. *International Journal of Community Well-Being*, 4(1), 33–53. <https://doi.org/10.1007/s42413-020-00077-4>
- Khuan, H., Aziz, S., & Raza, A. (2025). Implications of Government Policy on Investment and Economic Growth. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2069>
- Kumari, R., & Singh, S. K. (2024). Impact of ICT Infrastructure, Financial Development, and Trade Openness on Economic Growth: New Evidence from Low- and High-Income Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 7069–7098. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01332-7>
- Lestari, R. I., Wardono, B., Handajani, M., Supari, S., Juniati, H., Sunarno, M. T. D., & Prayogi, E. (2025). The interplay of road infrastructure and regional finance in driving economic growth: Insights from East Kalimantan. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100444>
- Liang, C., Shah, S. A., & Bifei, T. (2021). The Role of FDI Inflow in Economic Growth: Evidence from Developing Countries. *Journal of Advanced Research in Economics and Administrative Sciences*, 2(1), 68–80. <https://doi.org/10.47631/jareas.v2i1.212>
- Litriani, E. (2021). Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 10(1), 80–87. <https://doi.org/10.12244/jies.2021.5.1.001>
- Lozano, R. (2025). Human Capital Expansion in the Form of Formal Education: A Key Promoter of Individual, National, and Regional Economic Growth and Development. *International Trade Journal*, 39(3), 282–291. <https://doi.org/10.1080/08853908.2025.2473933>
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Matra Pembangunan*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.65-75>
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics* (8th ed.). Worth Publishers.
- Männistö, P. M., & Moate, J. (2024). A phenomenological research of democracy education in a Finnish primary-school. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 68(5), 1025–1038. <https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2196525>
- Medeiros, V., Ribeiro, R. S. M., & Amaral, P. V. M. (2026). Infrastructure, growth, and regional disparities: Looking at efficiency, redistribution, and equity goals in road investments. *Research in Transportation Economics*, 115, 101668. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2025.101668>
- Mulyani, S., Titik, I., Candra, A., Ananda, F., & Zen, F. (2023). *Infrastructure for Inclusive Economic Development Volume 1: Lessons Learnt from Indonesia*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- Nairobi, N., Santi, N. R., & Afif, F. Y. (2021). The impact of the quality of democracy on the economic growth of provinces in Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(2), 121–132. <https://doi.org/10.35912/jgas.v1i2.626>
- Nguyen, M. L. T. (2022). Foreign direct investment and economic growth: The role of financial development. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2127193>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Nurlinah, Haryanto, Sukri, & Sunardi. (2021). Informal politics and local labor activism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 53(4), 561–581. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1965896>



- OECD. (2025). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (Fifth Edition). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/7f05c0a3-en>
- Oliveira, H., Moutinho, V. F., & Afonso, O. (2025). Exploring the Relationship Between Technological Progress, Human Capital, Political Uncertain, Energy Consumption, and Economic Growth: Evidence from a Panel Data Analysis. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02431-9>
- Österman, M., & Robinson, D. (2023). Educating Democrats or Autocrats? The Regime-Conditional Effect of Education on Support for Democracy. *Political Studies*, 71(4), 1298–1320. <https://doi.org/10.1177/003232172111067385>
- Otchia, C. S., & Wiryawan, B. A. (2025). The impact of special economic zones on structural change. *Journal of International Trade and Economic Development*, 34(1), 34–54. <https://doi.org/10.1080/09638199.2024.2309927>
- Payen, M., & Rondé, P. (2025). Culture, Institutions and Economic Growth. *World Economy*, 48(7), 1654–1678. <https://doi.org/10.1111/twec.13695>
- Pradhan, R. P., Arvin, M. B., & Nair, M. (2021). Urbanization, transportation infrastructure, ICT, and economic growth: A temporal causal analysis. *Cities*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103213>
- Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., Hall, J. H., & Bennett, S. E. (2022). Institutional development in an information-driven economy: can ICTs enhance economic growth for low- and lower middle-income countries? *Information Technology for Development*, 28(3), 468–487. <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2051417>
- Pramesti, A. R. I., & Hasmarini, M. I. (2025). Dampak Urbanisasi, Partisipasi Tenaga Kerja, Investasi dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1503–1513.
- Pratiwi, O. S., & Hanri, M. (2024). The Influence Of Information And Communication Technology (ICT) Development on Income Inequality Through Economic Development. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 12. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3>
- Primanto, A., & Undang, G. (2022). Impact Evaluation Of The Road Infrastructure Development Policy In Improving The Quality Of Education Services In Indonesia. *Jurnal Mantik*, 5(4), 2332–2339.
- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. *Humaniora*, 4(1), 196–204. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>
- Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Straub, D. W. (2012). A Critical Look at the Use of PLS-SEM in MIS Quarterly. <http://ssrn.com/abstract=2176426>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Röthel, T., & Leschke, M. (2025). Unveiling the mutual dynamics: Institutions, education and economic growth over 138 years in OECD countries. *Kyklos*, 78(1), 243–270. <https://doi.org/10.1111/kykl.12416>
- Roztock, N., Soja, P., & Weistroffer, H. R. (2020). Enterprise systems in transition economies: research landscape and framework for socioeconomic development. *Information Technology for Development*, 26(1), 1–37. <https://doi.org/10.1080/02681102.2017.1377148>
- Saba, C. S., David, O. O., & Voto, T. P. (2024). Institutional quality effect of ICT penetration: Global and regional perspectives. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 27. <https://doi.org/10.4102/sajems.v27i1.5180>
- Sa'dia, N. H., & Fitriady, A. (2023). Evaluation of Special Economic Zone (SEZ) Impact on Economic Growth: Evidence of Simalungun Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 11(4), 113–130. [https://doi.org/10.14246/irspsd.11.4\\_113](https://doi.org/10.14246/irspsd.11.4_113)
- Sari, R. L., Hasyim, S., Afifudin, S., & Ruslan, D. (2020). Analysing the Structural Relationship between Labor Productivity and Investments in Indonesia: An Application of Two-Stage Least Square. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 646–662. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Setor, T. K., Senyo, P. K., & Addo, A. (2021). Do digital payment transactions reduce corruption? Evidence from developing countries. *Telematics and Informatics*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101577>
- Sijabat, R. (2024). Democracy, Human Development, Income Distribution and Regional Economic Performance: A Panel Data Analysis of 34 Provinces in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(1), 73–93. <https://doi.org/10.22146/jsp.76139>
- Suhendra, I., Istikomah, N., Anwar, C. J., Supriadi, A., Wakhid, A. A., Purwanda, E., & Salim, A. (2025). Influence of the digital economy on economic growth: empirical study of a region in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2457477>
- Tafese, T., Lay, J., & Tran, V. (2025). From fields to factories: Special economic zones, foreign direct investment, and labour markets in Vietnam. *Journal of Development Economics*, 174, 103467. <https://doi.org/10.1016/J.JDEVECO.2025.103467>
- Teegelbeckers, J. Y., Nieuwelink, H., & Oostdam, R. J. (2023). School-based teaching for democracy: A systematic review of teaching methods in quantitative intervention studies. In *Educational Research Review* (Vol. 39). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100511>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- Trentini, M. (2022). Political attitudes, participation and union membership in the UK. *Industrial Relations Journal*, 53(1), 19–34. <https://doi.org/10.1111/irj.12352>
- Trinugroho, I., Achsanta, A. F., Pamungkas, P., Saputro, N., & Yuniarti, S. (2023). Democracy, economic growth, and income inequality: Evidence from province level data. In *Cogent Economics and Finance* (Vol. 11, Number 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220244>
- Tripathi, M., & Inani, S. K. (2020). Does information and communications technology affect economic growth? Empirical evidence from SAARC countries. *Information Technology for Development*, 26(4), 773–787. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1785827>
- Uddin, I., Ahmad, M., Ismailov, D., Balbaa, M. E., Akhmedov, A., Khasanov, S., & Haq, M. U. (2023). Enhancing institutional quality to boost economic development in developing nations: New insights from CS-ARDL approach. *Research in Globalization*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100137>
- Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). PENGARUH PDRB, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-



2021. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Wang, C., Lim, M. K., Zhang, X., Zhao, L., & Lee, P. T. W. (2020). Railway and road infrastructure in the Belt and Road Initiative countries: Estimating the impact of transport infrastructure on economic growth. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 134, 288–307. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.02.009>
- Wardhana, I. W., Riesfandiari, I., Jamal, E., Hanifah, V. W., Pihri, P., Handoyo, F. W., Purwono, N., Ramadhan, R. P., Setyawan, B., Placek, M., W. B. P. A., Chrysanti, N. D., Daniswara, R. M., Wijanarko, B., & Setiadi, E. (2025). Does a special economic zone impact the surrounding economy? The case study of Kendal, Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04448-0>
- Windhani, K., Purwaningsih, Y., Mulyaningsih, T., Samudro, B. R., & Hardoyono, F. (2023). Human Capital and Regional Economic Growth in Indonesia: A Spatial Analysis Approach. *Indonesian Journal of Geography*, 55(3), 473–487. <https://doi.org/10.22146/ijg.88241>
- Wulandari, Y. (2023). Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Utara 2021.
- Yaqoob, K., Jehan, Z., & Sherbaz, S. (2025). Inclusive Institutions and Sustainable Development: Applying Acemoglu and Robinson's Framework to the Global South. *The Lahore Journal Of Economics*, 30(1), 81–110. <https://doi.org/10.35536/lje.2025.v30.i1.a4>
- Yin, X., Jiayi, G., & Selvaratnam, D. P. (2024). The Effect of Average Years of Schooling on GDP Per Capita Change Rate: Evidence from Malaysia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-67>
- Yu, D., Yang, L., & Xu, Y. (2022). The Impact of the Digital Economy on High-Quality Development: An Analysis Based on the National Big Data Comprehensive Test Area. *Sustainability (Switzerland)*, 14(21). <https://doi.org/10.3390/su142114468>
- Zahra, H., Aiko, R., Rosyidah, A. K., Tarigan, C. I., Avriza, M., Ekonomi, F., Islam, B., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2025). Article History Analisis Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Produktivitas Ekonomi di Pulau Jawa Periode 2016-2023. *Sunan Kalijaga Islamic Economics Journal*, 4(2), 2829–9574. <https://doi.org/10.14421/skiej.2025.4.2.2784>
- Zeng, D. Z. (2021). The Past, Present, and Future of Special Economic Zones and Their Impact. *Journal of International Economic Law*, 24(2), 259–275. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab014>